BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi adalah teori yang berfokus pada interaksi perusahaan dengan masyarakat. Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi terus-menerus mencoba untuk memastikan bahwa mereka telah melakukan kegiatan perusahaan sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat (Ghozali dan Chariri, 2007). Selain itu juga, pengertian legitimasi sendiri adalah sistem pengelolaan perusahan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Menurut teori ini, perusahaan dan komunitas sekitarnya memiliki relasi social yang cukup erat karena keduanya terikat dalam suatu "sosial kontrak" (Isa Wahyudi, 2008).

Kontrak sosial merupakan suatu cara untuk menjelaskan besarnya keinginan masyarakat terhadap cara suatu perusahaan dalam mengoperasikan usahanya. Keinginan sosial masyarakat tidak selalu tetap tetapi mengalami peningkatan seiring berjalannya usaha perusahaan tersebut. Hal ini membuat perusahaan harus tangguh dalam menghadapi keinginan sosial dan lingkungan dimana perusahaan tersebut berdiri dan dioperasikan. Perusahaan dapat menerapkan beberapa kebijakan yang lebih tepat seperti menjalin komunikasi terhadap para investor maupun pemegang saham, dan juga mencari cara untuk dapat menyatukan sudut pandang para investor agar tidak ada perubahan dalam perusahaan tersebut (Fendy, 2019).

Perusahaan-perusahaan di industri tertentu juga dapat memberikan lebih banyak pengungkapan termasuk informasi yang terkait dengan risiko yang di hadapi perusahaan dalam laporan tahunan mereka, dengan tujuan untuk melegitimasikan kegiatan mereka dan mengkonfirmasi atas kepatuhan mereka dengan nilai-nilai sosial yang dapat diberikan kepada masyarakat (Mokhtar dan Mellet, 2013).

2.2 Pengungkapan Enterprise Risk Management

Enterprise Risk Management adalah kerangka kerja yang komprehensif dan integrative untuk mengelola risiko kredit, risik pasar, risiko operasional, modal ekonomi, dan transfer risiko dalam upaya memaksimalkan nilai perushaaan (Lam, 2007). *Enterprise Risk Management* berpotensi memiliki manfaat untuk para analis, investor, dan *stakeholders* (Amran, Manaf Rosli Bin & Cho Haat Mohd Hassan, 2009). Pesatnya pertumbuhan ekonomi menjadikan *enterprise risk management* sebagai bagian penting perusahaan dalam mempertahankan kinerja dan tingkat profitabilitas perusahaan. Kesadaran yang tinggi terhadap *enterprise risk management* sebagian besar sebagai akibat dari beberapa bencana yang dihadapi perusahaan dan kegagalan bisnis yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, setiap perusahaan sangat membutuhkan adanya *enterprise risk management* untuk mengurangi dan menangani setiap risiko perusahaan yang mungkin akan muncul kedepannya. Implementasi dari *enterprise risk management* ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi risiko sejak awal dan membantu membuat keputusan untuk mengatasi risiko tersebut.

Pengungkapan risiko dalam laporan keuangan tahunan dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang wajib dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang tidak diwajibkan oleh badan regulator pasar modal (BAPEPAM). Pengungkapan risiko merupakan suatu keharusan bagi perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan perusahaan terhadap para pengguna laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan risiko diatur dalam PSAK 60 (revisi 2010) berisi tentang pengungkapan instrument keuangan dan risiko. PSAK 60 mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi sehingga para pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi jenis dan tingkat risiko yang timbul dari instrument keuangan. *Enterprise Risk Management* diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk efisiensi dan efektivitas kualitas keputusan.

Manajemen risiko dalam suatu perusahaan memiliki banyak manfaat, diantaranya yaitu (1) perusahaan memiliki ukuran yang kuat dalam mengambil keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan (2) mampu memberikan arahan bagi perusahaan dalam melihat pengaruh yang mungkin akan timbul baik secara jangka pendek maupun jangka panjang (3) mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dalam segi financial (4) memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum (Rustam, 2019).

Pengungkapan informasi keuangan dapat berupa pengungkapan kualitatif dan pengungkapan kuantitatif. Dalam pengungkapan kualitatif, entitas harus mengungkapkan ekposure resiko, bagaimana resiko timbul, tujuan, kebijakan, dan proses pengelolaan resiko serta metode pengukuran resiko. Sedangkan untuk pengungkapan kuantitatif, entitas disyaratkan mengungkapkan resiko kredit, resiko likuiditas, dan resiko pasar, serta termasuk juga membuat analisa sensitivitas setiap jenis resiko pasar.

Terdapat 7 (tujuh) kerangka *Enterprise Risk Management* yaitu (Lam, 2007):

1. *Corprorate Governance*

   Mengembangkan manajemen risiko dari atas ke bawah. Selain itu juga tata kelola perusahaan digunakan untuk memastikan bahwa dewan komisaris dan direksi telah membuat proses organisatoris dan control perusahaan yang tepat untuk mengukur dan mengelola risiko lintas perusahaan. Contohnya seperti pedoman kerja (charter) dewan, prosedur pengangkatan dan pemecatan anggota dewan, kebijakan remunerasi anggota dewan dan manjemen, tanggung jawab dewan, dan program pelatiham pembinaan, dan pendidikan.
2. Manajemen Lini

   Digunakan untuk mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam aktivitas penghasil pendapatan perusahaan, termasuk pengembangan bisnis,

manajemen produk, penentuan harga, dan lain-lain. Contohnya seperti respon persaingan bisnis, pengendalian penjualan, dan strategi perusahaan.

3. Manajemen Portofolio

   Manajemen portofolio digunakan untuk mengumpulkan ekposur resiko, menggabungkan pengaruh diversifikasi, dan mengawasi konsentrasi risiko terhadap batas risiko yang dibuat. Contohnya seperti risiko tingkat likuiditas, risiko solvabilitas, risiko masalah litigasi, risiko suku bunga, dan risiko instrumen utang jangka panjang.

4. Transfer Risiko

   Transfer risiko atau pemindahan risiko untuk mengurangi eksposur risiko yang dipandang terlalu tinggi atau dipandang lebih efektif biaya apabila memindahkan risiko pihak ketiga daripada menahannya dalam protofolio risiko perusahaan. Contohnya seperti risiko tingkat likuiditas, risiko solvabilitas, risiko masalah litigasi, risiko suku bunga, dan risiko instrumen utang jangka panjang.

5. Analisis Risiko

   Untuk mengukur eksposur risiko perusahaan dan juga menelusuri pemicu risiko eksternal. Contohnya seperti risiko tingkat likuiditas, risiko solvabilitas, risiko masalah litigasi, risiko suku bunga, dan risiko instrumen utang jangka panjang.

6. Sumber Daya Data dan Teknologi

   Sumber daya data dan teknologi untuk mendukung proses analisis dari suatu pelaporan risiko perushaaan. Contohnya seperti sistem komputer, keamanan software, dan pengelolaan data.

7. Manajemen *Stakeholder*

   Manajemen *stakeholder* digunakan untuk menyampaikan dan melaporkan informasi terhadap risiko perusahaan kepada para *stakeholder*-nya. Contohnya seperti instrumen utang jangka panjang, harga ekuitas, persainagan antar perusahaan, serta isu-isu mengenai lingkungan dan kesehatan dan isu-isu keselamatan.

Berdasarkan *Enterprise Risk Management Framework* yang dikeluarkan oleh COSO (*Committee of sponsoring Organizations of the Treadway Commission),* terdapat 108 item pengungkapan *Enterprise Risk Management* yang mencakup 8 (delapan) dimensi, seperti yang dibawah ini:

No	Dimensi	Pengungkapan Item
1.	Lingkungan Internal	Pedoman kerja (charter) dewan, kode etik, kebijakan kompensasi menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham, target kinerja individu, prosedur pengangkatan dan pemecatan anggota dewan, program pelatihan, pelatihan dalam nilai-nilai etis, tanggung jawab dewan, tanggung jawab komite audit, tanggung jawab CEO, eksekutif senior yang bertanggung jawab untuk manajemne risiko, serta pengawasan dan manajerial.
2.	Penetapan Tujuan	Misi perusahaan, strategi perusahaan, tujuan bisnis perusahaan, benchmark yang diadopsi untuk mengevaluasi hasil, persetujuan strategi dengan dewan, serta hubungan antara strategi, tujuan, dan nilai pemegang saham.
3.	Identifikasi Kejadian	Penilaian risiko pada tingkat likuiditas, suku bunga, nilai tukar asing, belanja modal, akses ke

		pasar modal, instrumen utang jangka panjang, default, solvabilitas, harga ekuitas, komoditas, masalah litigasi, kepatuhan terhadap peraturan, kode industri, kode sukarela, rekomendasi tata kelola, pengelolaan data, sistem komputer, privasi informasi yang berkaitan dengan pelanggan, keamanan perangkat lunak, sifat persaingan, makro-ekonomi peristiwa, isu-isu lingkungan, masalah etika, kesehan dan isu-isu keselamatan, serta saham yang lebih rendah atau tinggi.
4.	Penilaian Risiko	Penilaian risiko dari point identifikasi kejadian, serta penambahan pengungkapan teknik yang digunakan untuk menilai dampak potensial dan kombinasi kejadian.
5.	Respon Risiko	Respon risiko didapatkan dari point yang dibahas di identifikasi kejadian, serta penambahan pengungkapan pengelolaan risiko dan pedoman tertulis mengenai pengelolaan risiko.
6.	Pengendalian Kegiatan	Pengendalian penjualan, penelaahan terhadap fungsi dan

		efektifitas kontrol, isu-isu otorisasi, dokumen dan catatan sebagai kontrol, prosedur verifikasi independen, kontrol fisik, serta proses pengendalian.
7.	Informasi dan Komunikasi	Verifikasi kelengkapan informasi, saluran komunikasi untuk melaporkan dugaan pelanggaran, serta saluran komunikasi pihak eksternal.
8.	Pemantauan	Proses pemantauan, audit internal, serta anggaran internal audit.

Tabel 2.1

Dimensi Dalam Pengungkapan *Enterprise Risk Management*

Alasan saya mengapa memilih menggunakan pengukuran dari COSO (*Committee of sponsoring Organizations of the Treadway Commission)* dikarenakan dari jurnal replikasi saya sendiri menggunakan pengukuran dari COSO *(Committee of sponsoring Organizations of the Treadway Commissiom)* yang dimana objek penelitiannya adalah Perusahaan Perbankan dan Perusahaan Perbankan juga adalah salah satu aspek pembagian dari Perusahaan Keuangan. Alasan lainnya dikarenakan kerangka kerja COSO juga bersifat inlusif, dimulai dengan dewan direksi dan komisaris selain manajer dan karyawan lainnya. COSO juga luas dalam menentukan risiko, mulai dari pemilihan strategis hingga kejadian tertentu, COSO juga transparan, serta membutuhkan pemantauan dan pelaporan (Brigham, 2013). Selain itu juga dari beberapa website yang saya baca memaparkan kelengkapan atau kelebihan kerangka kerja COSO dibandingkan dengan ISO 31000. Dan juga kerangka kerja COSO sudah bekerja sama dengan PwC yaitu sebuah perusahaan akuntansi dan konsultan besar yang tergabung kedalam *Big Four*.

2.3 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan gambaran kemampuan finansial perusahaan dalam suatu periode tertentu. Hubungan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan risiko adalah positif. Perusahaan dengan ukuran besar umumnya cenderung untuk mengadopsi praktik *Good Corporate Governance* dengan lebih baik dibandingkan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan adalah tingkatan dari suatu perusahaan yang menunjukkan kekayaan perusahaan melalui kapasitas tenaga kerja, kapasitas produksi, dan kapasitas modal yang digunakannya (Taranika & Solikhah, 2019). Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin banyak aktivitas yang akan dilakukan perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi risiko ketidakpastian yang tinggi (Fayola, 2020).

Pada umumnya perusahaan yang lebih besar memiliki aktivitas bisnis yang lebih kompleks. Sehingga kemungkinan risiko-risiko yang diterima akan lebih besar dibanding perusahaan yang lebih kecil (Kristono, 2013). Menurut KPMG dalam Ardiansyah dan Adnan, semakin besar perusahaan maka semakin besar pula risiko yang harus dihadapinya, termasuk keuangan, operasional, reputasi, peraturan, dan risiko informasi. Perusahaan yang lebih besar akan menerapkan *corporate governance* terkait dengan tanggungjawab perusahaan terhadap *stakeholders* karena dasar kepemilikan yang lebih luas (KPMG, 2001). Besar ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar (Sudarmadji, 2007). Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh investor dalam melakukan investasi, karena perusahaan besar dianggap sudah mencapai kedewasaan yang mencerminkan bahwa perusahaan tersebut relatif stabil dan mampu menghasilkan laba. Dari pengertian yang sudah dijabarkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan besar lebih cenderung untuk menerapkan risiko yang terpadu dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan kecil.

Meningkatnya total asset akan diikuti dengan meningkatnya model yang ditanam, sehingga tingkat penjualan akan semakin tinggi. Ketika penjualan meningkat, perputaran uang akan semakin besar sehingga akan menyebabkan tingginya kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar yang tinggi akan membuat perusahaan

semakin dikenal dalam lingkungan masyarakat sehingga menyebabkan pengungkapan risiko yang dilakukan perusahaan akan semakin besar. Oleh karena itu, untuk mengurangi terjadinya konflik maka perusahaan harus melakukan pengungkapan manajemen risiko.

Berdasarkan pendapat Badan Standarisasi Nasional, ada 3 (tiga) jenis ukuran perusahaan, diantaranya:

1. Perusahaan Kecil

   Perusahaan kecil yaitu jenis kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 dimana belum termasuk tanah dan bangunan. Selain itu pula, omzet penjualan paling sedikit Rp. 1.000.000.000.
2. Perusahaan Menengah

   Perusahaan menengah yaitu jenis perusahaan dengan kekayaan bersih termasuk tanah dan bangunan senilai Rp. 1-10 Milyar serta omzet penjualan lebih dari Rp. 1.000.000.000 dan tak lebih dari Rp. 50.000.000.000.
3. Perusahaan Besar

   Perusahaan besar yaitu perusahaan dengan kekayaan bersih termasuk tanah dan bangunan melebihi Rp. 10.000.000.000 serta omzert penjualan tahunan melebihi Rp. 50.000.000.000.

2.4 Konsentrasi Kepemilikan

Salah satu karakteristik struktur kepemilikan adalah konsentrasi kepemilikan. Struktur kepemilikan saham mencerminkan distribusi kekuasaan dan pengaruh di antara pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan (Nuryaman, 2008). Konsentrasi kepemilikan merupakan fenomena yang lazim ditemukan di negara dengan ekonomi sedang bertumbuh seperti Indonesia dan di negara-negara *continental Europe.* Sebaliknya, di negara-negara Anglo Saxon seperti Inggriss dan Amerika Serikat, stuktur kepemilikan relative sangat menyebar (Nuryaman, 2008). Perusahaan yang menggunakan saham dalam mendanai aktivitas bisnisnya kemungkinan besar memiliki sekelompok pemegang kendali atas aktivitas bisnis perusahaan. Konsentrasi kepemilikan menunjukan pemegang saham mayotitas

menuntut perusahan agar lebih transparan dalam mengungkapkan informasi risiko yang lebih luas (Nugroho, 2011). Semakin besar tingkat konsentrasi kepemilikan di suatu perusahaan, maka akan semakin kuat juga tuntutan perusahaan untuk semakin luas dalam mengungkapkan risiko yang mungin akan dihadapi perusahaan (K,D. Pangestuti, 2017).

Konsentrasi kepemilikan dapat dikatakan sebagai gambaran mengenai pihak yang memegang kendali atas kepemilikan atau aktivitas bisnis suatu perusahaan (Taman & Nugroho, 2012). Konsentrasi kepemilikan memiliki insentif untuk melakukan pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat dan meningkatkan peran investor dalam pemberian pengawasan terhadap manajemen risiko perusahaan dengan maksud untuk mencegah kemungkinan dampak kerugian yang akan dihadapi suatu perusahaan. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko yaitu salah satunya adalah memastikan adanya pemegang saham mayoritas dalam suatu perusahaan dengam minimal 1 (satu) pemegang saham besar (Desender, 2009)

Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individ atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relative dominan dibandingan dengan lainnya (Rini, 2006). Konsentrasi kepemilikan perusahaan dapat meningkatkan kontrol manajemen perusahaan semakin baik. Konsentrasi kepemilikan juga dapat meningkatkan peras investor untuk memberi pengawasan pada perusahaan tempat dimana ia berinvestasi (Desender, 2009).

2.5 Reputasi Auditor

Audit adalah cara untuk mengurangi laporan antara direktur dan pemegang saham yang tidak pasti dengan menggunakan pihak ketiga untuk mengkonfirmasi laporan keuangan yaitu auditor. Proses audit dalam perusahaan dilakukan oleh auditor internal dan eksternal. Kedua auditor tersebut memiliki peranan yang penting dalam *good corporate governance.* Auditor merupakan profesi seseorang yang berfokus

kepada auditing, auditor juga kunci mekanisme pengawasan eksternal dari sebuah organisasi. Auditor eksternal juga dapat mempengaruhi sistem pengawasan internal klien dengan membuat rekomendasi *post-audit* pada peningkatan desain dari sistem.

Reputasi auditor merupakan istilah auditor yang memiliki nama baik, kepercayaan public, serta memiliki prestasi atas jasa yang telah digunakan. *Big Four* yang merupakan proksi dari reputasi auditor. Banyak perusahaan yang menggunakan jasa auditor *Big Four* karena dipandang memiliki reputasi dan keahlian yang baik untuk mengidentifikasi risiko, sehingga dapat meningkatkan kualitas penilaian dan pengawasan risiko perusahaan (Melinda 2016). Kantor akuntan public yang termasuk dalam *Big Four* merupakan kantor akuntan public yang memiliki label reputasi auditor yang mempunyai kualitas audit yang terpercaya. *Big Four* memberikan pedoman dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan, dapat membantu internal audit di perusahaan dalam meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan mengevaluasi sehingga meningkatkan kualitas dari pengawasan dan penilaian risiko perusahaan (Kumalasari, Subowo, & Anisykurillah, 2014). Oleh karena itu perusahaan harus dapat mengungkapkan informasi terkait risiko yang akan terjadi di perusahaan.

Menurut IAPI 2013, KAP Indonesia yang berafiliasi dengan KAP *Big Four*, yaitu:

1. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja berafiliasi dengan Ernst & Young Global Limited.
2. KAP Osman Bing Satrio & Eny berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
3. KAP Shiddharta Widjaja & Rekan berafiliasi dengan KPMG.
4. KAP Tanudiredjo, Wibisama, Rintis & Rekan berafiliasi dengan Price Waterhouse Coorpers Global Network.

2.6 Dewan Komisaris

Menurut peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, dewan komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi, sedangkan ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris yang berasal dari internal ataupun eksternal perusahan. Dewan komisaris adalah sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan yang berperan terhadap aktivitas pengawasan. Dewan komisaris juga merupakan organ perseroan kedua dalam struktur *corporate governance* yang memiliki fungsi kontrol dalam perusahaan.

Fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan komisaris bertujuan untuk melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi pertimbangan-pertimbangan kepada direksi. Dengan peran dewan komisaris tersebut diharapkan dapat meningkatkan dalam pengungkapan risiko oleh manajemen melakui fungsi monitoring atas pelaporan keuangannya, besar kecilnya ukuran dewan komisaris bukanlah menjadi faktor penentu utama dari efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Akan tetapi, mekanisme pengendalian tergantung pada nilai, norma, dan kepercayaan yang diterima dalam suatu organisasi serta peranan dewan komisaris dalam aktivitas pengendalian terhadap manajemen perusahaan (Suryono, 2016).

Jumlah yang besar yang dimiliki oleh Dewan Komisaris diprediksi akan memiliki insentif yang lebih untuk memberikan pengawasan dalam pelaksanaan praktik pengungkapan risiko perusahaan, agar tidak ada informasi yang disembunyikan (Desender, 2009). Dewan direksi selain sebagai organ dari perusahaan ia juga memiliki tugas dan tanggungjawab secara *kolektif* yaitu melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dan memastikan bahwa perusahaan telah melakukan *good corporate governance.* Disetiap perusahaan dewan direksi yang dimiliki memiliki perbedaan disetiap unsurnya. Kita bisa menyimpulkan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris akan sangat membantu suatu perusahaan untuk mengawasi direksi dan memberikan keputusan atau kebijakan. Dewan

komisaris seharusnya lebih besar daripada dewan direksi, karena dilihat dari fungsinya yaitu untuk memberikan nasihat kepada direksi dan melakukan pengawasan. Maka jika dewan komisaris lebih sedikit dari dewan direksi, pengawasan yang dilakukan tidak akan optimal dan apabila adanya perbedaan pendapat antara dewan komisaris dan dewan direksi , dewan komisaris memiliki tekanan psikologis.

Skala yang digunakan adalah skala rasio, dengan jumlah anggota dewan komisaris yang besar menambah peluang untuk saling bertukar informasi dan keahlian guna memberikan pengawasan yang efektif mengenai manajemen risiko perusahan, sehingga dapat meningkatkan kualitas *Enterprise Risk Management.* Selain itu juga, banyaknya jumlah rapat yang dilakukan dewan komisaris dapat mendorong perusahaan untuk lebih luas dalam mengidentifikasi risiko yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan kemudian dewan komisaris dapat mendiskusikannya bersama *risk management committee* untuk mencari solusi dalam memitigasi risiko yang akan dihadapi perusahaan (Kumalasari, 2014).

Struktur keanggotan untuk dewan komisaris sendiri, minimal terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang dimana 1 (satu) diantaranya yaitu Komisaris Independen. Apabila jumlah dewan komisaris lebih dari 2 anggota dewan komisaris, maka jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris didalam perusahaan tersebut.

2.7 Risk Management Committee

Risk Management Committee adalah komite yang terfokus terhadap masalah risiko yang terjadi di perusahaan yang dinilai dapat mendukung dewan komisaris untuk mengawasi risiko dan manajemen pengendalian internal (Fayola, 2020). *Risk Management Committee* dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggungjawab langsung kepada dewan komisaris dimaksudkan untuk membantu mengawasi dan memantau implementasi manajemen risiko perusahaan. Direksi menetapkan kebijakan manajemen risiko sebagai acuan dalam mencapai sasaran jangka panjang

perusahaan dan manajemen risiko sebagai wujud komitmen untuk penerapan manajemen risiko di seluruh organisasi secara luas dan terintegrasi, dalam rangka menunjang kepastian pencapaian sasaran jangka panjang perusahaan, serta memberikan kerangka penerapan manajemen risiko secara sistematis dan terukur sesuai persyaratan internasional.

Komite manajemen risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu dewan komisaris dalam memberikan pendapat profesional dan independen guna memastikan diterapkannya manajemen risiko disuatu perusahaan. Fungsi komite manajemen risiko akan lebih efektif dengan partisipasi anggota komite. Frekuensi rapat komite menunjukkan upaya komite dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Keberadaan komite risiko dan penunjukan *chief risk officer* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (Florio & Leoni, 2017). *Risk management* berguna untuk penciptaan nilai perusahaan, mengurangi biaya modal dan mengurangi potensi financial distress (Krause & Tse, 2016). Keberadaan dari *Risk Management Committee* ini akan membantu perusahaan dalam mengidentifikasi risiko yang dihadapi dan meningkatkan kualitas penilaian dan pengawasan risiko dengan harapan dapat meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan (Trinanda & Anisykurillah, 2017).

Tugas dan wewenang *risk management committee* :

1. Melakukan evaluasi operasi manajemen risiko organisasi.
2. Mempertimbangkan strategi dalam manajemen risiko organisasi.
3. Memastikan bahwa organisasi dalam praktiknya memenuhi peraturan yang berlaku dan juga ketentuan hukum.
4. Menaksir pelaporan keuangan organisasi.

Peranan yang tidak boleh dilakukan oleh internal audit dan disarankan untuk dilakukan oleh RMC sebagai unit yang independen, antara lain:

1. Menetapkan batasan dan selera risiko.
2. Memastikan berlangsungnya proses manajemen risiko pada perusahaan.
3. Melakukan validasi atas risiko yang telah teridentifikasi dan teratur.

Dalam pembentukannya, *Risk Management Committee* dapat tergabung dengan audit atau dapat pula menjadi komite yang terpisah dan berdiri sendiri. Komite terpisah tetapi tetap dibawah pengawasan Dewan Komisaris yang secara khusus berfokus pada masalah risiko, dapat dinilai menjadi mekanisme yang efektif dalam mendukung dewan komisaris untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam tugas pengawasan risiko dan manajemen pengendalian internal (Subramaniam, *et al.*, 2009). *Risk Management Committee* yang terpisah dari audit akan lebih dapat mencurahkan lebih banyak waktu dan usaha untuk menggabungkan berbagai risiko yang akan dihadapi perusahaan secara luas dan mengevaluasi pengendalian terkait secara keseluruhan (Subramaniam, *et al*., 2009).

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Desak Nyoman Wiona Budi Fayola & Annisa Nurbaiti (2020)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Konsentrasi Kepemilikan, Reputasi Auditor dan *Risk Management Committee* terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*	Variabel ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, reputasi auditor, dan *risk management committee* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *enterprise risk management*. Secara parsial, variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara positif dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan secara negatif terhadap pengungkapan *enterprise risk management*.

			Sedangkan, reputasi auditor dan *risk management committee* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *enterprise risk management.*
2.	Denia Ratna Sari, Dwi Cahyono, & Astrid Maharani (2019)	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, dan *Risk Management Committee* Terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*	Secara simultan ukuran dewan komisaris dan komite manajemen risiko berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko perushaaan, sedangkan secara parsial ukuran dewan komisaris dan komite manajemen risiko berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko perusahaan.
3.	Wilson AMB Sinaga, Mohamad Rafki Nazar, & Muhammad Muslih (2018)	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, *Risk Management Committee* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penerapan *Enterprise Risk Management*	Secara simultan ukuran dewan komisaris, *risk management committee* dan ukuran perushaan berpengaruh signifikan terhadap penerapan *enterprise risk management.* Sedangkan secara parsial, ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *enterprise risk management*, untuk *risk management committee* tidak

			berpengaruh positif terhadap ERM.
4.	Gissel Glenda Agista & Ni Putu Sri Harta Mimba	Pengaruh *Corporate Governance Stucture* Dan Konsentrasi Kepemilikan Pada Pengungkapan *Enterprise Risk Management.*	Hasil penelitian ini adalah komisaris independen yang diukur dengan proporsi dewan komisaris tisak mempengaruhi luas pengungkapan ERM, sedangkan RMC, CRO, dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif secara parsial pada luas pengungkapan ERM.
5.	Barbara Gunawan & Yulia Nurul Zakiyah (2017)	Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance,* Ukuran Perusahaan, Dan *Leverage* Terhadap *Risk Management Disclosure*	Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif antara reputasi auditor dan ukuran perusahaan terhadap risiko pengungkapan manajemen risiko dengan tingkat signifikansi masing-masing 0,0003 dan 0,000. Kepemilikan institusional, ukuran dewan dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko.
6.	Anggi Pristya Kirana (2015)	Pengaruh Komisaris Independen, Reputasi Auditor, Komite Manajemen Risiko dan Konsentrasi	Reputasi auditor dan komite manajemen risiko berpengaruh positif terhadap *enterprise risk management.* Sedangkan komisaris independen dan

		Kepemilikan Terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*	konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM.

2.9 Kerangka Pemikiran

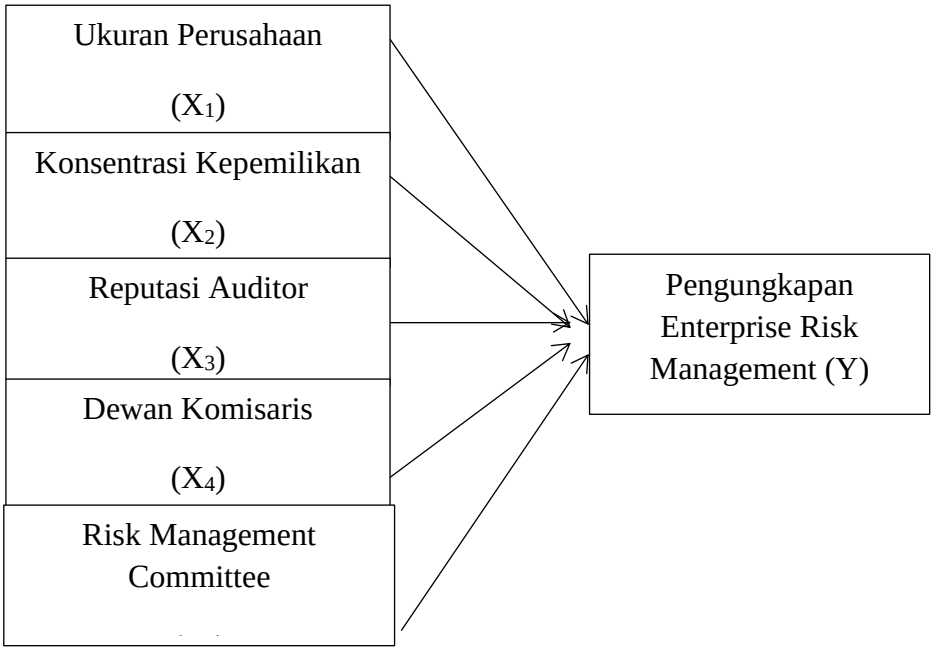

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.10 Bangunan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management.*

Perusahaan besar dapat menyediakan laporan untuk keperluan internal sekaligus dapat digunakan sebagai bahan untuk keperluan pengungkapan informasi kepada pihak eksternal. Semakin besar perusahaan, maka akan semakin banyak informasi

yang akan diungkapkannya. Semakin banyak informasi yang diungkapkan, maka hal-hal yang diungkapkan tersebut akan semakin detail pula, seperti informasi mengenai manajemen resiko perusahaan, hal ini dikarenakan perusahaan besar dianggap mampu untuk menyediakan informasi tersebut. Menurut teori legitimasi, perusahaan-perusahaan besar lebih termotivasi untuk mengungkapkan risiko dengan tujuan dapat mempertahankan legitimasi dan reputasi perusahaan mereka dimata masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Desak Nyoman dan Annisa Nurbaiti (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management.* Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis pertama dari penelitian ini yaitu:

H_1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management.*

2.10.2 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikian Terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*

Semakin besar tingkat konsentrasi kepemilikan, maka akan semakin kuat tuntutan untuk mengidentifikasi resiko yang mungkin akan dihadapi perusahaan seperti resiko keuangan, operasional, reputasi, peraturan, dan hukum. Dengan adanya struktur konsentrasi kepemilikan dianggap dapat meningkatkan kualitas manajemen risiko, perusahaan yang memiliki konsentrasi kepemilikan pemegang saham mayoritas akan memiliki preferensi yang kuat untuk mengendalikan manajemen.

Dalam dunia nyata, pemiliki saham mayoritas akan memberikan tekanan besar kepada manajemen perusahaan untuk dapat mengidentifikasi risiko secara mendasar untuk mengurangi besarnya dampak dari risiko yang harus diterima para pemegang saham mayoritas, dengan jumlah saham besar yang dimiliki maka akan berdampak pada besarnya risiko yang akan dihadapi oleh pemegang saham. Desak Nyoman Wiona Budi Fayola dan Annisa Nurbaiti (2020) menemukan bahwa Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk*

Management. Dengan demikian, dapat dirumuskan untuk hipotesis kedua dari penelitian ini yaitu:

H_2 : Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management.*

2.10.3 Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*

Manusia itu bersifat *self-interest,* sehingga diperlukan kehadiran pihak ketiga yang independen untuk melakukan mediasi pada hubungan antara *principal* dan *agent,* dalam hal ini adalah auditor independen sebagai pihak ketiganya (Ttrinanda & Anisykurillah, 2017). Penelitian ini menggunakan *big four* sebagai proksi dari reputasi auditor karena *big four* dipandang memiliki reputasi dan keahlian yang baik untuk mengidentifikasi risiko perusahaan yang mungkin terjadi.

Audit *Big Four* merupakan salah satu kunci dari mekanisme pengawasan eksternal dalam satu entitas, ketika perusahaan dalam pengauditanya menggunakan jasa auditor *Big Four* maka efektifitas dalam pengelolaan manajemen risiko perusahaan dapat berjalan sehingga secara tidak langsung auditor *Big Four* mampu meningkatkan pengungkapan *Enterprise Risk Management.* Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Daniel T.H Manurung, R/ Wedi Rusmawan Kusumah, 2016) bahwa keberadaan Reputasi Auditor berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan *Enteprise Risk Management.* Penggunaan KAP *big four* akan membuat pihak manajemen perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan pengendalian risko agar memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian dari KAP yang berkompeten dalam hal ini sejalan dengan teori legitimasi, yang dimana perusahaan akan mempertahankan kelegitimasian perusahaan di mata masyarakat. Dengan demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu:

H_3 : Reputasi Auditor berpengaruh terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management.*

2.10.4 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Managemet.*

Dewan komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi, sedangkan ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris yang berasal dari internal ataupun eksternal perusahaan. Jumlah anggota dewan yang besar menambah jumlah peluang untuk saling bertukar informasi dan keahlian sehingga meningkatkan kualitas pengungkapan *Enterprise Risk Management* (Desender, 2007). Desender et al (2007) menemukan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*Meskipun manajemen risiko merupakan tanggung jawab manajemen, dewan komisaris harus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penerapan manajemen risiko.

Dengan proporsi keanggotaan dewan komisaris yang cukup dalam arti tidak terlalu banyak atau tidak lebih dari 7 orang, maka keberadaan dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan fungsi manajemen dalam mengelola resiko karena informasi yang didapat menjadi lebih beragam dan akurat. Dengan demikian, hipotesis yang keempat dalam penelitian ini, yaitu:

H_4 : Dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management.*

2.10.5 Pengaruh *Risk Management Committee* Terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management.*

Risk Management Committee merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan manajemen risiko perusahaan. Dalam pembentukannya, *Risk Management Committee* dapat tergabung dengan komite audit atau menjadi komiter terpisah dan berdiri sendiri yang khusus berfokus pada masalah resiko. Perusahaan yang memiliki *Risk Management Committee* dapat lebih mencurahkan waktu, tenaga, dan kemampuan untuk mengevaluasi pengendalian internal dan

menyelesaikan berbagai resiko yang mungkin dihadapi perusahaan (Andarini dan Indira, 2010).

Perusahaan yang memiliki *Risk Managemet Committee* dapat meningkatkan kualitas penilaian dan pengawasan risiko, serta mendorong perusahaan untuk mengungkapkan resiko yang dihadapi. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Marheni & Yanto (2015) yang menyimpulkan bahwa *Risk Management Committee* (RMC) berpengaruh positif terhadap *Enterprise Risk Management* dikarenakan dapat meningkatkan kualitas penilaian dan pengawasan risiko, serta mendorong perusahaan untuk mengungkapkan risiko yang akan dihadapi. Penelitian yang dilakukan oleh Marheni & Yanto (2015) semakin kuat mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rustiarini (2012) yang menemukan bahwa *Risk Management Committee* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management.* Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis selanjutnya pada penelitian ini, yaitu:

H_5 : *Risk Management Committee* berpengaruh terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management.*